

# **PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN WIRAU\$AHA MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA**

Firman Suryana Sugiana, Jajat, S. Ardiwinata<sup>1</sup>, Joni Rahmat Pramudia<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia  
[Firmansugiana@student.upi.edu](mailto:Firmansugiana@student.upi.edu)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan yang harus dimiliki oleh pendamping desa dalam peranannya untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat dengan memanfaatkan bantuan operasional dana desa sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas memberdayakan masyarakat desa Cimeuhmal. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dari pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat, langkah-langkah pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha, dan kemandirian berwirausaha masyarakat sebagai hasil pendampingan melalui program dana desa. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, konsep pendampingan, konsep dana desa, konsep pengelolaan program. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 5 orang yakni satu pendamping local desa, 2 orang warga binaan, 2 orang aparatur pemerintahan desa. Berdasarkan hasil temuan penelitian, berkaitan dengan peran utama dari pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha dapat ditentukan bahwa: 1) Peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha terdapat beberapa indikator dalam peran yakni fasilitator, motivator, supervisor, komunikator dan administrator. 2) Langkah-langkah pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat dapat di tentukan dalam pelaksanaan pendampingan yaitu antara lain perencanaan pendampingan dengan melakukan tahapan identifikasi kebutuhan, pelaksanaan sebagai penyelenggara program pendampingan, kemudian evaluasi sebagai bentuk mengetahui dan mengukur keberhasilan program. 3) kemandirian berwirausaha masyarakat sebagai hasil pendampingan melalui program dana desa sebagai bentuk pencapaian dari keberhasilan program pendampingan pada masyarakat yang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni memiliki rasa tanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, mampu memenuhi kebutuhan pokok, memiliki etos kerja, disiplin, kemudian berani dalam mengambil sebuah resiko dalam menjalankan usaha.

**Kata Kunci** : Kemandirian berwirausaha, peran pendamping, dana desa

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the demands that must be had by village assistants in their role in empowering the community by utilizing operational assistance from village funds as a support in carrying out the task of empowering the Cimeuhmal village community. The purpose of this study is to determine the role of village facilitators in increasing the independence of community entrepreneurship, the steps of village companions in increasing entrepreneurial independence, and community entrepreneurship independence as a result of assistance through the village funding program. The theoretical basis of this research is the concept of community empowerment, the concept of assistance, the concept of village funds, the concept of program management. The method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using interview, observation, documentation study. The research subjects consisted of 5 people namely one local village companion, 2 assisted residents, 2 village government officials. Based on the research findings, related to the main role of village facilitators in increasing entrepreneurial independence it can be determined that: 1) The role of village facilitators in increasing entrepreneurial independence there are several indicators in the role of the facilitator, motivator, supervisor, communicator and administrator. 2) The steps of village facilitators in increasing the independence of community entrepreneurship can be determined in the implementation of assistance, including planning assistance by carrying out the stages of identifying needs, implementing as an organizer of a mentoring program, then evaluating as a form of knowing and measuring the success of the program. 3) the independence of community entrepreneurship as a result of assistance through the village funding program as a form of achievement of the success of community assistance programs that can be seen from several aspects namely having a sense of responsibility, not dependent on others, being able to meet basic needs, having a work ethic, discipline, then dare to take a risk in running a business.*

**Keywords** : Entrepreneurial independence, role of counterpart, village funds

## PENDAHULUAN

Sejarah pemerintahan desa sering berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Keberadaan desa selama kurun waktu Indonesia merdeka tidak secara tegas diatur untuk kemandirian rumah tangganya. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur tentang penyelenggaraan desa bukan dinyatakan dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa dan daerah pedesaan. Apabila dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di desa dan di kota lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa. Sudah seharusnya pusat perhatian dalam upaya pembangunan ditujukan kepada masyarakat desa. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengukuhkan secara tegas keberadaan desa dalam tata negara Indonesia. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya sesuai potensi dan budaya tersendiri di dalamnya, setidaknya pembangunan era pemerintahan saat ini dapat memberi dorongan sehingga desa berkembang menjadi kota, peri kehidupan desa berubah menjadi kehidupan kota. Seandainya perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan tidak didukung oleh rakyat di desa-desa di seluruh tanah air, tentu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah berdiri tegak.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri no 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat posisi keuangan desa mengenai aktivitas, kewajiban dan modal dana satu periode.

Berkaitan dengan salah satu dari program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan local berskala desa, Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian sangat besar dari public, mengingat nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dan pendamping desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2019, kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa khususnya terkait dana desa.

Rincian alokasi dana desa pada APBN-P 2020 telah dipublikasikan oleh pemerintah. Dari 33 provinsi penerima dana desa, 3 diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak. Provinsi itu antara lain, Jawa timur sebesar Rp.4.72 triliun, Jawa tengah sebesar Rp. 3,83 triliun dan Jawa barat berkisar 3.30 triliun, Perbedaan jumlah dana desa tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah kemiskinan dan geografis. Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan diantaranya seperti : pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk dan pengembangan ternak. Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok nelayan dan pengrajin.

Kabupaten subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa barat yang mendapat kucuran anggaran dana desa sebesar Rp.208 miliar lebih dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020. Kemudian untuk desa Cimeuhmal sendiri menerima kucuran anggaran desa yang mencapai kurang lebih Rp.900 juta yang dimana kedudukan wilayah di desa Cimeuhmal sendiri perlu adanya pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Besarnya dana yang diterima mengandung kekhawatiran banyak pihak. Seperti kita ketahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan, namun dikhawatirkan jurtru akan menjadi lahan aparat desa melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu tugas utama pendamping desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu pendamping desa memiliki ruang strategis dalam misi pembangunan desa setelah lahirnya undang-undang desa tentu tidak indah bila penempatan sumberdaya manusia dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar yang mapan apalagi keluar dari aturan yang berlaku. Terlebih dalam kurun waktu yang lama desa tidak secara tegas diatur dalam urusan pemerintah yang mandiri. Dalam konteks ini tenaga pendamping profesional menjadi pilihan sebagaimana profesionalitas dari pendamping desa tertuang dalam pasal 4 huruf (a) peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yakni pendamping desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari tenaga pendamping profesional. Terlebih banyak dari segi kualifikasi pendidikan yang menjadi seorang pendamping desa yang bukan ahlinya dan banyak dari lulusan SMA ini yang menjadikan kurangnya pengalaman dan pemahaman dalam pemberdayaan terutama dalam mengelola program dana desa.

Pada penelitian ini ditekankan bahwa untuk mengkaji secara umum bagaimana peranan pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat yang di bantu oleh program dana desa, baik itu dari segi pengelolaan program dana desa sampai dengan hasil dari keikutsertaan masyarakat dalam program pendampingan tersebut, kemudian dari persoalan dari permasalahan tersebut di tekankan pula kompetensi dari seorang pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya di Desa Cimeuhmal ini dan mengkaji mengenai kesiapan dari lulusan pendidikan masyarakat yang perlu menjadi seorang pendamping desa, karena sangat diperlukan baik itu dari segi pengalaman, materi dan segi kesiapan dalam mengelola dana desa.

Dari hasil wawancara dan temuan dilapangan menyatakan bahwa, peran penting dari pendamping desa masih bisa dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, mengingat tugas yang dilakukan adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan dapat mendampingi desa untuk kepentingan masyarakat, dalam hal tersebut pendamping desa dapat bekerja secara maksimal melalui program yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya program dana desa yang dialokasikan untuk proses pemberdayaan masyarakat, melihat dari peran aktif dari pendamping desa yang dimana adalah sebagai gugus terdepan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat pentingnya peran dari pendamping desa, peneliti sangat tertarik dengan permasalahan tersebut dan perlu dikaji kembali terkait dengan pelaksanaan dari adanya pendamping desa dan mengkaji beberapa proses dari kemandirian berwirausaha masyarakat yang dimana dalam hal ini adalah adanya program dana desa yang menjadikan sebagai pelaksanaan dari proses pembelajaran dan pembangunan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian wirausaha masyarakat melalui pemanfaatan program dana desa menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif.. Teknik pengumpulan data menggunakan *Wawancara, Observasi, Dokumentasi* Penelitian ini bertempat di Desa Cimeuhmal di Jl. Raya Subang-sumedang, RT 03/RW 05, Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti kegiatan program kewirausahaan. Kemudian seorang pendamping dan perwakilan dari aparatur pemerintah desa menjadi fokus penelitian. Sehingga narasumber yang diteliti adalah 4 orang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peneliti akan membahas hasil temuan yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti buat maka pada bagian ini akan membahas mengenai 1) Peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat, 2) langkah-langkah pendamping dalam pendampingan kemandirian berwirausaha, 3) Hasil kemandirian berwirausaha masyarakat setelah mengikuti program pendampingan.

### **1. Peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat melalui program dana desa**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah program yang diselenggarakan

oleh pendamping untuk membantu meningkatkan pendapatan warga masyarakat. Dalam penyelenggaraan program kemandirian berwirausaha ini berperan pentingnya seorang pendamping desa dalam mengelola dan menjalankan peran sebagai seorang pendamping.

Ada beberapa aspek dalam peran pendamping untuk menjalankan tugasnya yang dijelaskan oleh beberapa ahli menurut Binaswadaya (dalam Nurlaela Neni, 2005, hlm. 19). Berdasarkan pada deskripsi hasil temuan yang dilakukan mengenai peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha dapat diuraikan berikut.

a. Fasilitator

Berdasarkan hasil temuan, fasilitator disini adalah bagaimana peran sebagai seorang pendamping untuk dapat bisa memfasilitasi, mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok kemudian seorang fasilitator dapat membantu apabila didalam suatu kelompok tidak memiliki suatu tujuan yang sama, maka peran dari fasilitator inilah untuk meluruskan permasalahan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini sejalan dengan Menurut Binaswadaya (dalam Nurlaela Neni, 2005, hlm. 19) seorang pendamping dapat dikatakan berhasil apabila berhasil melakukan beberapa hal seperti menyampaikan materi kepada warga binaan masyarakat serta memberikan sarana fasilitas tempat sebagai penunjang kegiatan pendampingan.

Pada kegiatan pemberian materi, pendamping dituntut memiliki pengalaman dan pengalaman dalam menyampaikan sebuah materi, dalam hal ini pendamping apabila tidak mempunyai kemampuan tersebut pendamping melakukan penyampaian materi yang dilakukan oleh beberapa pakar yang berkompeten di bidangnya, tidak hanya memberikan materi pada program pendampingan harus disediakan juga tempat penunjang untuk melaksanakan kegiatan program pendampingan untuk kegiatan pendampingan ini dilakukan di balai desa Cimeuhmal yang dimana kegiatan ini dipusatkan di balai desa dan tidak menyediakan fasilitas tempat lainnya.

b. Motivator

Berdasarkan hasil temuan lapangan, peran pendamping yang dilakukan dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat perlu adanya peran untuk memotivasi masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi mengikuti kegiatan pendampingan. Dalam hal ini sejalan dengan Binaswadaya (dalam Nurlaela Neni, 2005, hlm. 19) motivator sebagai hal penting dalam peran pendamping untuk bisa memotivasi masyarakat dan mendorong untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan.

Pada peran motivator ada beberapa macam yang perlu dilakukan oleh seorang pendamping yakni melakukan motivasi kepada warga binaan untuk sosialisasi beserta mendorong warga masyarakat untuk menghadiri kegiatan pendampingan yang dilaksanakan untuk masyarakat tersebut, dari temuan lapangan pendamping sudah melakukan motivasi kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi pada program tersebut, kemudian melakukan motivasi untuk mempunyai tabungan modal yang digunakan sebagai usaha modal awal yang dijalankan oleh warga masyarakat walaupun ada bantuan dari pihak desa apabila dari warga masyarakat yang ingin memiliki modal usaha awal dari pihak desa memberikan bantuan dengan bekerja sama dengan pihak bank untuk bisa membantu warga binaan, sehingga motivator merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh pendamping untuk memotivasi masyarakat dan mendorong untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan pendampingan.

c. Supervisor

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh beberapa informasi mengenai peran pendamping dalam melakukan supervisor kepada warga masyarakat, pada indicator supervisor ini pendamping dituntut untuk bisa melakukan mediasi kepada warga masyarakat dan melakukan penengah konflik apabila didalam kegiatan program ataupun pada saat praktek dilapangan terjadi beberapa konflik permasalahan. Hal ini ditunjukan oleh Binaswadaya (dalam Nurlaela Neni, 2005, hlm. 19) yang menyatakan peran penting seorang pendamping sebagai supervisor. Selain dapat bisa memecahkan suatu permasalahan dan menjadi seorang penengah dalam konflik tersebut, pendamping harus melakukan pengawasan kepada warga binaan, apabila pada saat setelah menyelesaikan suatu permasalahan dapat langsung menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

d. Komunikator

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan mengenai peran pendamping dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat pada poin komunikator diterangkan bahwa dalam peran pendamping ini harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi kepada warga binaan terlebih dalam menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan

penyelenggaraan program pendampingan kemandirian berwirausaha tersebut dan dijelaskan dalam Binaswadaya (dalam Nurlaela Neni, 2005, hlm. 19) menyebutkan bahwa dalam peran pendamping disebutkan ada indikator yang digunakan sebagai acuan dari peran pendamping dalam melaksanakan pendampingan.

Pada indikator komunikator pendamping ini terdapat ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti konsuler yang dilakukan apabila didalam masyarakat memiliki suatu bantuan dan masalah yang berkaitan dengan usahanya dan melakukan pemahaman yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dari apa yang disampaikan oleh pendamping pada saat program. Selain peran penting dari pendamping ini yang di kutip dari pendapat ahli, maka peran dari seorang pendamping sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

e. Administrator

Berdasarkan hasil temuan dengan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan mengenai peran pendamping ini pada poin administrator bahwa seorang pendamping selain melakukan terkait penyelenggaraan secara langsung, seorang pendamping dapat bisa membuat administrasi yang dilakukan sebagai acuan dan laporan resmi penyelenggaraan kepada pihak terkait dan bisa dilakukan evaluasi dari adanya pelaporan tersebut mengingat Binaswadaya (dalam Nurlaela Neni, 2005, hlm. 19) peran dari pendamping yang menyatakan bahwa ada point indikator yang mengharuskan pendamping untuk membuat suatu laporan kehadiran dan keuangan untuk dilakukan pelaporan kepada pihak terkait sehingga di dalam kegiatan pendampingan ini bisa mengetahui tingkat kehadiran dari warga binaan. Pada kegiatan pendampingan ini membuat sebuah laporan kehadiran yang diharuskan warga binaan untuk mengisi kehadiran tersebut dan laporan keuangan yang dibuat oleh pendamping sebagai hasil penyelenggaraan kegiatan dan mendata masyarakat yang memiliki cicilan dalam pinjaman mereka kepada pihak bank yang menjadi mitra desa dalam upaya membantu masyarakat yang ingin mempunyai usaha.

## **2. Langkah-langkah pendamping dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, diketahui bahwa program pendampingan yang dilakukan oleh pendamping merupakan program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan prinsip memberdayakan masyarakat yang mempunyai usaha, masyarakat yang berkeinginan mempunyai usaha serta masyarakat menengah usaha yang perlu dibantu ekonominya.

Pengelolaan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan pada deskripsi hasil temuan yang dilakukan mengenai langkah-langkah yang dilakukan pendamping dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Perencanaan Program

Berdasarkan hasil temuan, mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pendamping dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha terdapat perencanaan yang sudah ditentukan oleh pihak perangkat desa dan pendamping sehingga program tersebut dapat terarah tujuannya dan manfaat. Hal ini sejalan dengan Menurut Sudjana (2004, hlm. 57), perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga dapat diartikan merupakan usaha yang sadar, terorganisasi untuk tercapainya sebuah program yang akan dijalankan. Perencanaan juga dapat diartikan sebuah kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditujukan untuk mengetahui sebuah akar dari permasalahan didalam suatu program.

Pada tahapan identifikasi masalah dalam proses perencanaan ini berkaitan dengan analisis kebutuhan dari warga binaan. Menurut Suharto (2005, hlm. 76-77) identifikasi masalah perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan teknik-teknik dan indikator yang tepat. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang didapatkan mengenai identifikasi kebutuhan bahwa pendamping desa melakukan identifikasi kebutuhan kepada warga binaan, langkah-langkah yang dilakukan oleh pendamping berdasarkan pada rencana yang ditentukan diawal program kemudian diturunkan sebagai sebuah rencana program yang setelah itu dirumuskan secara musyawarah desa sehingga dapat menentukan program yang akan ditentukan kedepannya. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan kondisi wilayah kemudian dilakukan survei kelayakan wilayah, setelah dirasa cukup untuk

dilakukannya proses identifikasi, maka pendamping melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program pendampingan kemandirian berwirausaha dan melihat potensi usaha yang dimiliki oleh warga binaan.

Kemudian dalam penentuan tujuan program tentu semua program memiliki sebuah tujuan dan bermanfaat untuk warga binaan dan masyarakat lainnya. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Suharto (2005, hlm. 77-78) bahwa tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Tujuan dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebuah target program untuk mencapai keberhasilan. Program kemandirian berwirausaha ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan ekonomi, pendidikan dan mensejahterakan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik dan menambah tali silaturahmi antar masyarakat di Desa Cimeuhmal.

Program pendampingan kemandirian berwirausaha melakukan pemberdayaan dalam bidang diantaranya bidang ekonomi, bidang pendidikan, oleh karena itu untuk warga masyarakat apabila mengikuti program pendampingan ini akan mendapatkan banyak manfaat setelah mengikuti program ini. Program pendampingan kemandirian berwirausaha ini merupakan sebuah program yang digagas oleh pendamping desa dan sesuai dengan tugas dan fungsi dari kepala desa yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa sehingga masyarakat di Desa Cimeuhmal untuk bisa mandiri dalam menjalankan kehidupannya.

#### b. Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan program pendampingan kemandirian berwirausaha, antusias dan partisipasi warga binaan dalam mengikuti kegiatan dampingan ini bisa dibilang bagus. Mengingat rentang kehadiran yang mencapai 90% warga binaan yang menghadiri kegiatan dampingan yang dilaksanakan pada hari Sabtu setiap 1 minggu sekali ini karena warga binaan akan merasakan banyak manfaat yang bisa didapatkan seperti layanan pengetahuan mengenai kewirausahaan, layanan keuangan dan layanan pembinaan. Tempat kegiatan dampingan dilaksanakan sesuai kesepakatan warga binaan dan pendamping, kegiatan tersebut dilaksanakan di aula balai Desa Cimeuhmal karena dapat menjadi akses yang mudah bagi masyarakat dan sangat bermanfaat bagi warga binaan. Hal tersebut disebabkan karena selain memberikan pinjaman modal bagi warga binaan yang dibantu bekerja sama dengan pihak bank untuk senantiasa apabila masyarakat membutuhkan pinjaman, maka pihak desa bisa membantu masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak bank. Program ini dirancang dan didanai oleh dana desa sebagai program untuk pemberdayaan masyarakat yang dicetuskan oleh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Terluar tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa no 11 tahun 2019 pasal 12 yakni Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan membangun desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga program pendampingan ini sepenuhnya menggunakan dana desa sebagai penunjang kegiatan pendampingan ini dan sudah menjadi sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk dijadikan sebuah program yang wajib diselenggarakan di Desa Cimeuhmal.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang diberikan oleh pendamping dan pihak desa diantaranya alat tulis, buku modul dan beberapa peralatan penunjang untuk pelatihan. Penyediaan sarana dan prasarana pun diberikan saat penyelenggaraan pelatihan. Semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelatihan didukung dan disediakan oleh pendamping dan pihak desa. Dalam pelaksanaan program pendampingan kemandirian berwirausaha ini memiliki teknis pelaksanaan yaitu kegiatan administrasi seperti pengisian kehadiran peserta, pembacaan ayat suci Al-quran, pemberian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemberian motivasi dan semangat bagi warga binaan yang sedang mempunyai masalah dalam usahanya. Pemberian motivasi dan semangat kepada warga binaan oleh pengurus bertujuan agar mereka memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### c. Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan setelah aspek perencanaan dan aspek pelaksanaan selesai dilaksanakan untuk melihat hasil yang telah dicapai dan mengetahui kendala yang ditemukan dalam program tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki program selanjutnya. Menurut Suharto (2005, hlm. 79- 80) dalam tahap evaluasi program, analisis kembali kepada permulaan proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadi sebuah perencanaan sebagai suatu proses yang berkeseluruhan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan jika program sudah dilaksanakan. Namun demikian, perencanaan yang baik harus berdasarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian di lapangan bentuk evaluasi yang diberikan

kepada warga binaan berupa angket untuk mengetahui kekurangan peserta dalam menerima materi, kepuasan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pendamping yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta menguasai materi yang disampaikan dan kepuasan warga binaan terhadap sarana dan prasarana yang diberikan. Pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi adalah pendamping desa, sedangkan untuk pihak yang dievaluasi merupakan warga binaan program kemandirian berwirausaha itu sendiri, karena apabila semuanya mengetahui apa yang kurang dapat dengan langsung mengevaluasinya untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Aspek yang dievaluasi dilihat dari berbagai aspek diantaranya pemahaman materi, kepuasan warga binaan terkait fasilitas dan peningkatan usaha warga binaan serta keaktifan kehadiran warga binaan.

### **3. Hasil pendampingan dalam program kemandirian berwirausaha masyarakat**

Gambaran kemandirian berwirausaha warga binaan pada dasarnya memiliki karakteristik menurut Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) mengenai karakteristik kemandirian seorang dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya tanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, memiliki etos kerja, disiplin dan berani mengambil resiko.

#### **a. Tanggung jawab**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, hasil dari keikutsertaan peserta warga binaan dapat dilihat dari tanggung jawab warga binaan terhadap usahanya yang dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari tanggung jawab warga binaan untuk melakukan beberapa pinjaman yang digunakan untuk sebagai awal modal usaha dan mampu membayar dengan cicilan kepada pihak bank sebagai mitra dalam program pendampingan ini. Bentuk tanggung jawab kedua yaitu amanah uang yang diberikan untuk modal usaha yang wajib ditunaikan oleh warga binaan, meskipun belum semua warga binaan belum secara penuh mengimplementasikan tanggung jawabnya terhadap usahanya. Menurut Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) menyebutkan bahwa rasa tanggung jawab ini adalah rasa kemauan serta kemampuan dalam diri seorang individu untuk melakukan sebuah kewajiban yang diperoleh. Selain itu, rasa atau kemauan serta kemampuan tersebut dapat memanfaatkan hak hidupnya secara baik. Terkait dengan hal dan kewajiban sudah pasti berbicara mengenai aturan-aturan atau norma hidup yang berlaku dan dipegang kuat oleh kelompok masyarakat.

#### **b. Tidak bergantung pada orang lain**

Berdasarkan hasil temuan, mengenai hasil warga binaan setelah mengikuti pendampingan program kemandirian berwirausaha dapat dilihat dari tidak bergantungnya warga binaan pada orang lain atau mandiri dapat dikatakan baik. Menurut Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) pada dasarnya memiliki hak yang sama dari hak dasar dan relative terbebas dari gangguan orang lain, serta dapat dipertahankan secara mutlak karena memiliki kekuatan hukum yang jelas. Seseorang yang memiliki sikap mandiri sudah pasti ia tidak akan memanfaatkan hal orang lain untuk menjadikan hak tersebut untuk dirinya dalam tengah-tengah hal orang lain.

#### **c. Mampu memenuhi kebutuhan**

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh data mengenai mampu memenuhi kebutuhan pokok. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok memenuhi kebutuhan pokok sebagian besar warga binaan dalam penyelenggaraan program kemandirian berwirausaha. Untuk hasil dari keikutsertaan warga binaan sebagian sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dari pendapatan yang dihasilkan dari usahanya. Sejalan dengan itu menurut Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) pada dasarnya memiliki hak yang mana dari hak dasar dan relatif tersebut terbebas dari gangguan orang lain, serta dapat dipertahankan secara mutlak karena memiliki kekuatan hukum yang jelas. Seseorang yang memiliki sikap mandiri sudah pasti ia tidak akan memanfaatkan orang lain untuk menjadikan orang tersebut untuk dimanfaatkan. Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi dapat dilihat juga dari kesejahteraan keluarga, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendapatan keluarga.

#### **d. Memiliki etos kerja**

Berdasarkan hasil data di lapangan yang ditemukan oleh peneliti terkait memiliki etos kerja dari warga binaan program kemandirian berwirausaha masyarakat, bahwa sebagian besar warga binaan memiliki etos kerja yang tinggi meskipun tidak semua warga binaan demikian karena hal tersebut tergantung kepada warga binaan itu sendiri. Etos kerja yang dimunculkan oleh warga binaan adalah sering mengerjakan pekerjaannya sampai larut malam semangat berbelanja kebutuhan usaha, dan pendamping pun selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga etos kerja anggota kembali meningkat. Hal tersebut selaras dengan pendapat Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) pada karakteristik keempat adalah seorang individu dapat dikatakan mandiri bila memilih kemauan dalam

bekerja yang baik dan memiliki etos kerja yang tinggi (maksudnya sangat bekerja keras). Hal ini ditandai oleh adanya ketekunan dalam bekerja, semangat kerja yang tinggi, memiliki prinsip keseimbangan kerja antara pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.

e. Disiplin

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh data mengenai disiplin dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar warga binaan sudah menerapkan sikap disiplin dalam menjalankan usahanya, seperti disiplin waktu, disiplin manajemen usaha, dan disiplin untuk selalu konsisten membuka usahanya setiap hari, karena mereka tidak terlepas dari monitoring dari pendamping. Menurut Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) mengatakan bahwa karakteristik selanjutnya yang dimiliki oleh individu yang mandiri adalah mereka yang memiliki sikap konsisten dengan komitmen tentang pekerjaan, jika pekerjaan tersebut dapat memberi manfaat bagi diri pribadinya maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan Lutfiansyah serta melihat kondisi dilapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedisiplinan dari anggota Kopmu DT sudah baik, karena mereka selalu konsisten dalam mengerjakan usahanya, sehingga anggota mendapatkan kebermanfaatn dari hasil usaha yang dijalankan.

f. Berani mengambil resiko

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan mengenai hasil program kemandirian berwirausaha pada point berani mengambil resiko diperoleh data bahwa warga binaan pada program pendampingan kemandirian berwirausaha sudah berani mengambil resiko, karena banyak dari warga masyarakat yang sudah memiliki usaha walaupun hanya sedikit adalah para pelaku usaha maka mereka sudah mengetahui resiko yang akan diterima dalam kegiatan usahanya, seperti resiko produk usaha yang tidak laku, pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan keluhan konsumen terhadap kepuasan produk, karakteristik wirausaha menurut Alma (2001, hlm. 39) mempunyai ciri percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi masa depan. Seperti yang dijelaskan oleh Lutfiansyah (dalam Endah, 2019, hlm. 17-18) bahwa orang yang mandiri tidak pernah merasa takut terhadap kegagalan dalam usahanya. Karena rasa takut dalam diri individu akan sangat mempengaruhi pula terhadap sikap dan perilakunya, termasuk rasa takut dapat juga menjadi penghambat seorang individu untuk gesit bergerak dalam usahanya.

Tabel 1 Perbandingan Peningkatan Kemandirian Sebelum dan Setelah Pendampingan

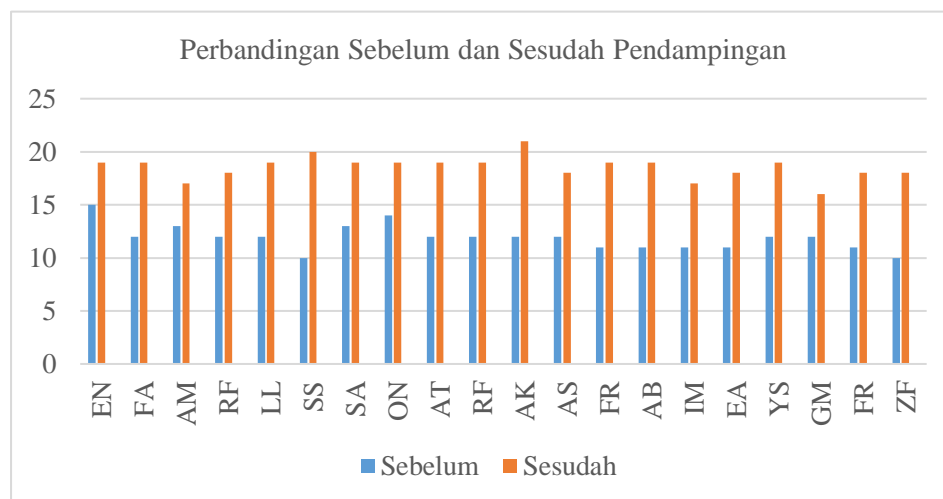
No	Aspek Kemandirian	Skor Jawaban		Skor Selisih	%
		Sebelum	Sesudah		
1	Tanggungjawab	42	69	28	1,67 %
2	Bergantung pada orang lain	38	63	25	1,04 %
3	Kebutuhan	39	63	24	0,92 %
4	Tekun	44	58	14	0,58 %
5	Disiplin	31	58	27	1,125 %
6	Berani mengambil resiko	46	60	14	0,58 %
Jumlah				132	

Tabel 2. Perbandingan Peningkatan Kemandirian Responden Sebelum dan Setelah Pendampingan

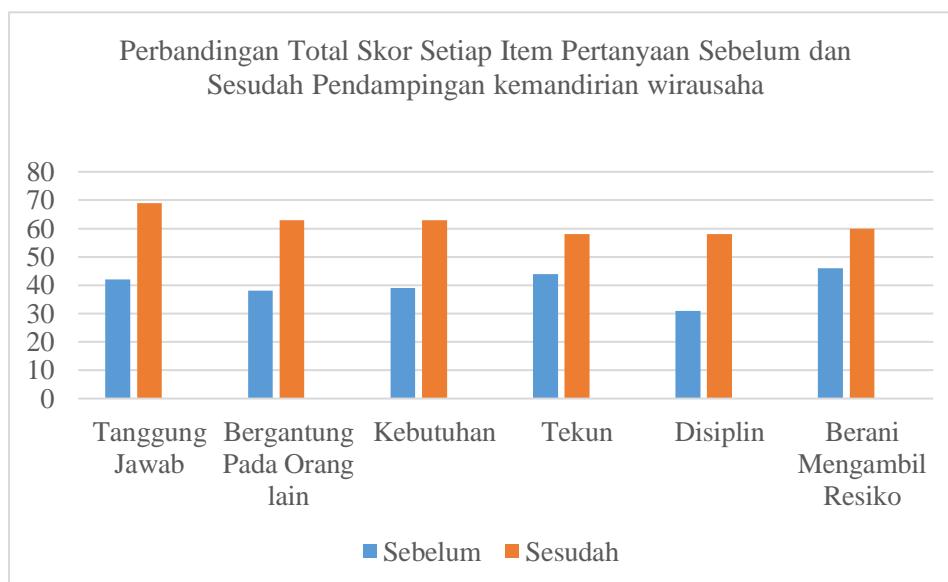
No	Responden	Skor Jawaban		Skor Selisih
		Sebelum	Sesudah	
1	EN	15	19	4
2	FS	12	19	7
3	AM	13	17	4
4	RF	12	19	8
5	LL	12	18	7
6	SS	12	19	7
7	SA	10	20	10
8	ON	13	19	6
9	AT	14	19	4
10	RF	12	19	7
11	AK	12	21	9
12	AS	12	18	6
13	FR.	11	19	8



14	AB	11	19	8
15	IM	11	17	6
16	EA	11	18	7
17	YS	12	19	7
18	GM	12	16	4
19	FR	11	18	7
20	ZF	10	18	7
Jumlah				133



Grafik 3 Grafik Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pendampingan



Grafik 4 Perbandingan Total Skor Setiap Item Pertanyaan Sebelum dan Sesudah Pendampingan kemandirian wirausaha

Hasil pendampingan program kemandirian berwirausaha pada warga binaan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak semuanya sesuai antara teori dan keadaan dimasyarakat. Dalam pelaksanaannya, sikap kemandirian dalam berwirausaha tumbuh begitu saja, karena mereka mempunyai amanah yang telah diberikan oleh pendamping u dengan penuh kepercayaan memberikan modal untuk dijadikan sebuah usaha agar warga binaan di Desa Cimeuhmal dapat berdaya. Namun untuk kemandirian berwirausaha warga binaan sendiri mereka sudah dikatakan mandiri, meskipun tidak semuanya dikatakan mandiri, masih ada beberapa warga binaan yang masih proses menuju mandiri.

Kemudian dengan adanya program tersebut kebutuhan masyarakat akan pendapatan mereka sudah dapat terpenuhi dengan adanya program tersebut, sehingga peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha sudah bisa membantu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjalankan usahanya dan dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN

Setelah warga binaan mengikuti program pendampingan kemandirian berwirausaha ini tentunya warga binaan sudah bisa dikatakan sudah mandiri dan pada saat pelaksanaan program pendampingan sudah dapat dikatakan lancar maupun untuk teknis di dalam penyelenggaraan pendampingan. Pada aspek kemandirian berwirausaha ini pada dasarnya sudah menerapkan acuan dari teori-teori yang di sampaikan sehingga pelaksanaan dan pengalaman-pengalaman warga binaan setelah mengikuti program pendampingan ini sudah dikatakan mampu untuk berdiri sendiri atau mandiri. Akan tetapi walaupun sudah dikatakan mandiri, warga binaan harus tetap dilakukan pengawasan agar pada saat warga binaan mengimplementasikan baik itu dari materi dan pelatihan yang didapatkan dapat bisa di jalankan dengan baik serta untuk pendamping desa agar senantiasa melakukan pengawasan dan membuat suatu program untuk kedepannya apabila masyarakat menginginkan suatu program yang berhubungan dengan kewirausahaan.

## REFERENSI

- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Alma, B. (2007). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta
- Alma, B. (2009). *Kewirausahaan*. Bandung : Alfabeta.
- Ambarita, A. (2006). *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2004). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rinike Cipta
- Elly, S & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana
- Guntur, Efendi. M. (2009). *KUBE Sebagai Suatu Paradigma Alternatif dalam Membangun Sokoguru Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta : CV Sagung Seto
- Harjanto. (2005). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hasibuan, SP. (2004). *Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ife, Ji, and Frank Tesoriero. (2008). *Analisis Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kamil, M. (2010). *Model Pendidikan Pelatihan Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Kartasasmita, G. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada masyarakat*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Liliweri, A. (2003). *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Mardikanto, Totok, dkk. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto. (2009). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Setiadi, E.M & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada
- Sudjana, D. (2004). *Manajemen Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*. Bandung : Falah Production
- Sudjana, D. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*. Bandung : Falah Production.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : STKSPRESS
- Suryosubroto. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sutapa, M. (2007). *Buku Pegangan Kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta : FIP UNY
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Wiryasaputra, Totok. S. (2006). *Ready To Care, Pendamping dan Konseling Psikoterapi*. Yogyakarta : Galang Press

Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

**Sumber Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abtokhi, A. (2009). *Peran Ibu dalam Kegiatan Pendampingan Belajar Anak melalui Prinsip Individual Learning-Centered*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pusat Studi Gender (PSG), Vol. 4, No.2, hlm. 168-177. Tersedia [Online].

[Http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1993/pdf](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1993/pdf). Diakses pada 30 Februari 2020.

Nurlaela, N. (2005). *Studi Deskriptif Tentang Pendampingan Lifeskills Dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Masjid Yang Dikelola Oleh Yayasan Swadayamas Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung*. Skripsi. UPI Bandung

Putra, dkk. (2014). *Hubungan Kemandirian dengan Intensi Berwirausaha pada Universitas Brawijaya, Malang* [Online]. Diakses pada 25 Februari 2020, dari [Http://psikologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/JURNAL-Fixed.pdf](http://psikologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/JURNAL-Fixed.pdf)

[Mally, M. \(2005\). Dampak Program Pembelajaran Kejar Usaha Bidang Busana Kemandirian Usaha Belajar Berwirausaha. Tesis. Sekolah Pascasarjana UPI Bandung.](#)

Yunus, D. (2010). *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Untuk Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Berwirausaha*. Tesis. UPI Bandung.